

CASE STUDY

Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya

(Disusun Guna Menyelesaikan Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pendidikan)

Dosen Pengapu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd.

Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Andani Tanemu 2313031078

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

1. Analisis Struktur Pengeluaran

a. Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum dapat dikatakan efisien. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi anggaran yang mencapai 68% untuk gaji dan tunjangan guru, sementara kualitas pendidikan masih rendah, ditunjukkan oleh skor literasi dan numerasi yang berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa, distribusi guru yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara merata.

b. Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Bagian yang perlu direalokasi adalah anggaran yang terlalu besar pada gaji dan tunjangan guru serta pengeluaran administrasi. Meskipun kesejahteraan guru merupakan hal penting, proporsi sebesar 68% menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan masih habis untuk kebutuhan rutin dan belum berfokus pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program peningkatan kualitas guru, seperti pelatihan kompetensi, penguasaan teknologi pembelajaran, sertifikasi, serta pemerataan distribusi guru ke daerah terpencil. Hal ini penting karena masalah utama yang terjadi bukan hanya jumlah guru, tetapi juga ketimpangan penempatan tenaga pendidik antara wilayah kota dan desa. Dengan adanya realokasi tersebut, kualitas pembelajaran dapat meningkat dan hasil pendidikan menjadi lebih merata.

Selain itu, anggaran untuk infrastruktur dan bantuan siswa juga perlu ditingkatkan karena keduanya masih tergolong rendah dibandingkan kebutuhan pendidikan saat ini. Infrastruktur digital yang terbatas menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbesar investasi pada akses internet, perangkat teknologi pendidikan, laboratorium, dan fasilitas belajar yang memadai agar siswa dapat mengikuti perkembangan pembelajaran modern. Program bantuan siswa juga perlu diperluas dengan sistem pendanaan berbasis kebutuhan sehingga siswa dari keluarga kurang mampu dan sekolah di daerah tertinggal memperoleh dukungan yang lebih besar. Realokasi anggaran ini akan membuat penggunaan dana pendidikan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

a. Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih tergolong terlalu bergantung pada pemerintah daerah karena sebagian besar sumber pendanaan berasal dari APBD. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah apabila kemampuan keuangan daerah terbatas atau terjadi perubahan prioritas anggaran pemerintah. Selain itu, kebutuhan pendidikan terus berkembang, terutama untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, serta pembangunan infrastruktur digital yang memerlukan biaya besar. Jika

hanya mengandalkan pemerintah daerah, proses peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih lambat dan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sumber pembiayaan tambahan agar pembangunan pendidikan dapat lebih berkelanjutan dan merata.

- b. Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat!

Keterlibatan sektor swasta dan penggunaan skema pembiayaan alternatif sangat diperlukan untuk mendukung reformasi pendidikan di Nusantara Raya. Salah satu model yang tepat adalah kerja sama antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP). Dalam model ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu penyediaan fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur digital, laboratorium, maupun pelatihan keterampilan siswa sesuai kebutuhan dunia kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk beasiswa, pengembangan sekolah di daerah terpencil, dan penyediaan teknologi pembelajaran.

Selain PPP, pemerintah juga dapat menerapkan skema pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based funding*), yaitu pemberian dana berdasarkan pencapaian kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Model ini mendorong sekolah untuk lebih efektif dalam menggunakan anggaran karena pendanaan dikaitkan dengan capaian tertentu. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dana abadi pendidikan dan kolaborasi dengan lembaga donor atau perguruan tinggi untuk mendukung riset dan inovasi pendidikan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, pembiayaan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi lebih kuat, fleksibel, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

- a. Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Elemen praktik negara OECD yang realistis untuk diadopsi adalah sistem pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), pendanaan berdasarkan kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru, dan penggunaan sistem evaluasi berbasis data. Sistem tersebut dapat membantu pemerintah menyalurkan anggaran secara lebih efektif, terutama kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan evaluasi berkala juga realistis diterapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Penggunaan data pendidikan secara digital pun dapat membantu pemerintah memantau kualitas sekolah dan hasil belajar siswa dengan lebih akurat.

b. Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Tantangan implementasinya di Indonesia meliputi ketimpangan infrastruktur antarwilayah, terutama akses internet dan teknologi di daerah terpencil. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan data di beberapa daerah masih terbatas sehingga penerapan sistem evaluasi berbasis data belum optimal. Resistensi terhadap perubahan kebijakan juga dapat menjadi hambatan, terutama jika sistem baru memengaruhi pola pembagian anggaran atau penempatan guru. Tantangan lainnya adalah birokrasi yang kompleks serta perbedaan kapasitas keuangan antar daerah yang menyebabkan pelaksanaan reformasi pendidikan tidak selalu berjalan merata.

4. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

1. Perubahan struktur belanja.
2. Strategi peningkatan kualitas guru
3. Digitalisasi sekolah
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi

PROPOSAL REFORMASI PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah investasi krusial untuk pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara. Namun, pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan kualitas antara daerah, tidak optimalnya distribusi anggaran, rendahnya pemerataan kemampuan guru, dan keterbatasan infrastruktur digital di lembaga pendidikan. Sebagian besar dana pendidikan masih lebih ditujukan untuk pengeluaran sehari-hari daripada peningkatan kualitas pengajaran.

Di zaman kemajuan teknologi dan kompetisi global, pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat beradaptasi, kreatif, dan lihai dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam pembiayaan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berfokus pada hasil, agar kualitas pendidikan bisa meningkat secara merata dalam lima tahun ke depan.

B. Tujuan Reformasi

Dibawah ini merupakan tujuan dari Reformasi, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan distribusi dana pendidikan.
2. Meningkatkan standar dan kemampuan pengajar secara terus-menerus.
3. Mempercepat proses digitalisasi di sekolah dan dalam metode pembelajaran.
4. Menciptakan sistem pemantauan dan penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di semua daerah di Indonesia.

C. Rencana Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun Terakhir

1. Perubahan Struktur Belanja

Reformasi dilakukan dengan mengubah struktur pengeluaran pendidikan agar lebih fokus pada peningkatan kualitas. Selama periode lima tahun, pemerintah akan menurunkan bagian pengeluaran untuk administrasi dan meningkatkan dana untuk program peningkatan mutu pembelajaran. Adapun Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan dana untuk pelatihan pendidik, pembelian teknologi pendidikan, serta penyusunan kurikulum.
- b) Membagi anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah dan keadaan lokal.
- c) Memberikan perhatian khusus kepada daerah yang kurang berkembang dan sekolah dengan sarana yang terbatas.
- d) Membangun sistem pendanaan yang mengutamakan kinerja sehingga sekolah yang menunjukkan kemajuan kualitas mendapatkan bonus tambahan.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Guru menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan sehingga peningkatan kualitas guru menjadi prioritas reformasi. Program yang dapat direncanakan sebagai berikut:

- a) Pelatihan kompetensi guru secara berkala berbasis teknologi dan kebutuhan pembelajaran modern.
- b) Pemberian beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru berprestasi.
- c) Penguatan program sertifikasi dan evaluasi kinerja guru.
- d) Penyediaan platform pembelajaran digital untuk pelatihan mandiri guru.
- e) Pemberian insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

Dengan target Lima tahun kedepan, yaitu

- a) Seluruh guru mengikuti minimal satu pelatihan kompetensi setiap tahun.
- b) Peningkatan kemampuan literasi digital guru secara merata.

3. Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Adapun Program Digitalisasi yang dimaksud, yaitu:

- a) Penyediaan internet dan perangkat teknologi di sekolah.
- b) Pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital dan perpustakaan elektronik.
- c) Penggunaan aplikasi administrasi sekolah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- d) Pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa.
- e) Pengembangan sistem ujian dan evaluasi berbasis komputer.

Dengan target lima tahun ke depan, yaitu:

- a) Seluruh sekolah memiliki akses internet yang memadai.
- b) Minimal 80% proses administrasi sekolah dilakukan secara digital.
- c) Peningkatan penggunaan media pembelajaran digital dalam kegiatan belajar mengajar.

4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan transparan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil sebagai berikut.

- a) Membentuk sistem pelaporan anggaran pendidikan berbasis digital.
- b) Melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian program reformasi.
- c) Melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.
- d) Menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan hasil belajar, kompetensi guru, dan akses digital sekolah.
- e) Memberikan audit berkala terhadap penggunaan dana pendidikan.

D. Penutup

Reformasi dalam pendanaan pendidikan selama lima tahun adalah langkah krusial untuk memperbaiki mutu pendidikan di tanah air. Penataan ulang alokasi anggaran, peningkatan kemampuan pengajar, penerapan teknologi di sekolah, dan adanya sistem pemantauan serta penilaian yang efektif akan membantu mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Melalui perubahan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat melahirkan sumber daya manusia yang terampil, kompetitif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.